

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

BAZNAS dibentuk sebagai badan yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Keberadaan institusi ini diharapkan berjalan dengan kegiatannya masing-masing guna meningkatkan efektifitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Disamping itu Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai koordinator zakat secara nasional yang menaungi badan-badan amil zakat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sejalan dengan itu arus perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi kini semakin pesat yang dapat memberikan akses informasi secara terbuka bagi setiap orang. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, turut mempermudah BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS yang sistematis dan terintegrasi. Hadirnya teknologi informasi ini pun turut memudahkan masyarakat dalam mengakses

informasi seluas-luasnya. Maka hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap badan atau lembaga pemerintahan agar menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelenggara Negara yang baik, transparan dan akuntabel.

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 memberikan amanah kepada BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian berupaya membuat sebuah sistem informasi manajemen yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem informasimanajemen yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden melalui Kementerian Agama.<sup>2</sup>

Sebuah langkah tepat yang telah diambil sehingga pada tanggal 3 Oktober 2013, BAZNAS mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SiMBAZNAS. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBAZNAS) lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 2011 - Januari 2012. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah standard operating procedure (SOP)-nya. Targetnya adalah agar sebuah sistem dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan BAZNAS di

---

<sup>2</sup> <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/> diakses pada tanggal 14 November 2022 Pukul. 10.27

seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah. Maka SiMBAZNAS dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional.<sup>3</sup>

Pada dasarnya Sistem Informasi Manajemen menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi dalam proses organisasi. Selain itu, SIM disebut juga jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern maupun ekstern.

Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu SiMBA juga dilengkapi fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar.pada dasarnya adalah tulang punggung baznas yang harus berbasis digital, dengan SiMBA data yang di-input oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga BAZNAS pusat, dia bisa tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi,kota/kabupaten). ada tiga kabupaten yang

---

<sup>3</sup> Ibid.,

penerapan SiMBA-Nya sudah baik dan memiliki prestasi yaitu: Tuban, Gresik, dan Ngawi penerapannya sudah mencapai 80% dibandingkan dengan Tulungagung yang masih 78%. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi baznas Kabupaten Tulungagung yang sebentar lagi akan menyusul prestasi dari ketiga kabupaten tersebut.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balance*” dalam sistem administrasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, ed., *Kritik dan Otokritik LSM, membongkar kejujuran dan keterbukaan LSM di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2004), hal. 56

<sup>5</sup> Nico Andrianto, *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Cet. I, hal. 23

Transparansi (*Transparancy*) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>6</sup> Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Semua data yang bersifat laporan keuangan dan transaksi mengenai laporan keuangan Baznas akan dicatat pada SIMBA yang secara otomatis akan dihasilkan berbagai macam laporan yang dibutuhkan, mulai dari profil muzaki, mustahik, program yang dimiliki Baznas dan laporan mengenai dana ZIS yang telah terkumpul pada Baznas. Dalam menunjang keefektifan kinerja Baznas, sistem informasi manajemen Baznas juga dilengkapi pembuatan laporan keuangan yang telah mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109, selain itu SIMBA mampu melakukan pencetakan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan kuitansi transaksi penyetoran dana zakat.

Seperti diketahui, bahawasannya zakat merupakan suatu dana kepercayaan dari muzaki yang dititipkan ke unit pengelola zakat, dalam hal ini unit pengelolaan zakat adalah BAZNAS, yang diberi amanah oleh masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada orang yang

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2012), hal. 31,

membutuhkan. Sistem informasi manajemen Baznas (SIMBA) merupakan sistem pencatatan internal yang digunakan oleh Baznas untuk memudahkan amil dalam membuat laporan keuangan. Sehingga pelaporan dana ZIS terhadap pusat dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian pelaporan dana ZIS dapat dilakukan secara tepat dan terbuka.

Kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan terdapat unsur-unsur islami. Dalam melakukan suatu pengelolaan memerlukan suatu konsep GCG (Good Corporate Governance). Prinsip GCG antara lain meliputi keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, mandiri, setara.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini dan peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme penerapan teknologi informasi pada sistem SiMBA sebagai

upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada Baznas Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “**Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Di Baznas (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Tulungagung)**”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah penerapan teknologi informasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Baznas. Adapun pertanyaan dalam peneliti ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Baznas?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Baznas?
3. Bagaimana dampak implementasi dari Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Baznas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Baznas

(SiMBA) dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Baznas.
3. Untuk mengetahui dampak implementasi dari Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya perkembangan pengelolaan zakat secara terintegrasi terutama yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk memberikan laporan keuangan dan informasi yang transparan dan akuntabel. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai produk berfikir kritis dalam pengembangan wacana untuk dijadikan bahan penelitian lanjut bagi pihak yang berminat dari aspek yang berbeda.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa



Penelitian ini diharapkan akan menambah pengalaman, wawasan, dan menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi masyarakat mengenai Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

a. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.

Menurut usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup>

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>8</sup>

#### b. Sistem Informasi Manajemen

Pada umumnya sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunjangan pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut. Kini apabila orang mendengar istilah sistem

---

<sup>7</sup> Basyiruddin Usman, *Media Pendidikan*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002),hal. 87

<sup>8</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),hal 48

informasi manajemen, biasanya mereka juga membayangkan suatu sistem yang terkomputerisasi.

Secara harfiah, sistem informasi manajemen adalah sebuah bentuk sistem informasi yang ditujukan untuk melayani para manajer. Definisi mengenai sistem informasi manajemen sebenarnya lebih dikenal dengan arti sebuah sistem manusia dan mesin komputer yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan didalam suatu organisasi.<sup>9</sup>

Sesungguhnya, pengertian tentang sistem informasi manajemen di dalam organisasi telah ada sebelum perangkat komputer diciptakan. Sejak kemampuan alat proses komputer ini berkembang dan meningkat dengan pesat, sehingga dalam penggunaannya pun kini tidak hanya sebagai alat untuk mempercepat proses, namun juga sebagai alat yang mampu memberikan informasi secara akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap. Inti dari sistem informasi manajemen tentu saja terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, kerasipan, komunikasi diantara manajer organisasi, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan sistem informasi manajemen dan kebutuhan manajer terus berubah dan meningkat, maka berkembanglah

---

<sup>9</sup> Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hal. 90

sistem sistem yang lain seperti Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Sistem Informasi Eksekutif (SIE), Sistem Informasi Perkantoran (SIP) dan Enterprise Resource Planning (ERP).<sup>10</sup>

Dari beberapa uraian pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bermanfaat bagi pengguna, atau dengan kata lain sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan.

c. Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP menjelaskan, “Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris, yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban”<sup>20</sup> Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP mengutip beberapa sumber mengenai pengertian akuntabilitas diantaranya sebagai berikut;

---

<sup>10</sup> Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 58

Menurut J.B. Gharthey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.<sup>11</sup>

Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada alur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan. Ada (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut sumber lain, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok

---

<sup>11</sup> J.B Gharthey, *Decentralisation Transparency Social Capital and Development*, (Massachusetts : 1998), hal.65

<sup>12</sup> Ledvina V. Carino, *Administrative Accountability*, (San Francisco State University Fall : 2002), hal.37

masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “check and balance” dalam sistem administrasi.<sup>14</sup>

Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana dikemukakan Muhammad Zarei,<sup>15</sup> mengandung sebuah tindakan pertanggungjawaban yang berbentuk pelaporan atau penjelasan atas berbagai keputusan dan tindakan yang telah dilakukan kepada yang berwenang. Dalam hal ini, juga sebuah sikap untuk menerima berbagai konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang telah dikeluarkan tadi.

#### d. Transparansi

---

<sup>13</sup> Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, ed., *Kritik dan Otokritik LSM, membongkar kejujuran dan keterbukaan LSM di Indonesia*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 56

<sup>14</sup> Nico Andrianto, *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Cet. I, hal. 23

<sup>15</sup> Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, *Kritik dan Otokritik LSM ...* hal. 116

Transparansi (*Transparancy*) Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>16</sup> Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2012), hal. 31

Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

## **2. Secara Operasional**

Penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Di Baznas (Study Kasus Pada Baznas Kabupaten Tulungagung)” Secara operasional memaparkan tentang bagaimana mekanisme Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari :

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal penelitian ini meliputi : halaman sampul atau cover



depan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

## 2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan mengenai konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini berisi kajian pustaka yaitu sebagai Kerangka untuk menganalisis temuan data pada bab empat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga ini berisi metode penelitian yaitu analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode yang sistematis terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab empat ini membahas mengenai data dan temuan penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Di bab lima ini membahas mengenai hasil penelitian dari pembahasan bab IV tentang penerapan teknologi informasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Baznas Kabupaten Tulungagung.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi.

**3. Bagian Akhir**

Bagian Akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar Pustaka, lampiran-lampiran dari pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat persetujuan penelitian, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup, dan dokumentasi penelitian.